



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSLAN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 99532

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.027.275.000

1. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 242.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 11.810 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 177.150.000
4. Tanah Seluas 1.826 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 1.105 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 27.625.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.215.000.000
7. Tanah Seluas 4.654 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 155.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SCUTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINI BUS RS CVT I-VTEC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 31.145.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 66.780.232



F. HARTA LAINNYA	Rp.	140.000.000
Sub Total	Rp.	2.420.200.232
III. HUTANG	Rp.	997.648.779
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.422.551.453

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.